

## Analisis Kebijakan Ekonomi Moneter Dan Fiskal Dalam Pengendalian Inflasi Di Indonesia

**Akhmad Shandy**

<sup>a</sup> Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Dwy Arnanda Sihombing**

<sup>b</sup> Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Pani Akhiruddin Siregar**

<sup>c</sup> Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Siti Juniar**

<sup>d</sup> Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alamat : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Korespondensi penulis: [sitijuniar04@gmail.com](mailto:sitijuniar04@gmail.com)

**Abstract.** *Although Indonesia's economic development cannot be separated from monetary and fiscal policies, the monetary and fiscal policies pursued by each country depend on the actual economic conditions, direction and development goals to be achieved. This study analyzes the role of monetary and fiscal policy in controlling inflation in Indonesia. The method used is based on a qualitative approach. Data is collected from various sources such as literature, government policies and economic reports. The results of the analysis show that monetary policy which includes fixing interest rates by Bank Indonesia, and fiscal policy which includes budget management and taxation play an important role in controlling inflation. Factors such as economic growth, consumption levels, and price stability also influence the success of economic policy measures. The results of this research provide a better understanding of the dynamics of economic policy in facing inflation challenges in Indonesia and provide a basis for future policy making.*

**Keywords:** *Ekonomi Policy, Monetary, Fiscal, Controlling Inflation.*

**Abstrak.** Meskipun pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan moneter dan fiskal, namun kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh oleh masing-masing negara bergantung pada kondisi perekonomian sebenarnya, arah dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Studi ini menganalisis peran kebijakan moneter dan fiskal dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Metode yang digunakan berdasarkan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti literatur, kebijakan pemerintah dan laporan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang mencakup penepatan suku bunga oleh Bank Indonesia, dan kebijakan fiskal yang mencakup pengelolaan anggaran dan perpajakan berperan penting



dalam pengendalian inflasi. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat konsumsi, dan stabilitas harga juga mempengaruhi keberhasilan langkah-langkah kebijakan ekonomi. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika kebijakan ekonomi dalam menghadapi tantangan inflasi di Indonesia dan memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan masa depan.

**Kata kunci:** Kebijakan Ekonomi, Moneter, Fiskal, Pengendalian Inflasi.

## LATAR BELAKANG

Kebijakan ekonomi adalah adanya peraturan atau pembatasan kegiatan ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan kolektif. Selain kebijakan ekonomi, diperlukan kebijakan non-ekonomi seperti kebijakan sosial yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat (Luluk Masrufah, 2022)

Keputusan bank sentral terhadap kebijakan moneter indikator kegiatan ekonomi dan inflasi dilaksanakan melalui mekanisme transmisi moneter. Bank sentral menggunakan suku bunga mempunyai dampak besar terhadap perekonomian suatu negara. Pengaruh ini dinyatakan dalam ekspektasi suku bunga, harga aset dan nilai tukar. Proses ini mempengaruhi permintaan agregat dan juga aktivitas ekonomi serta inflasi. Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum akibat peningkatan jumlah uang beredar dan peningkatan jumlah uang beredar yang tumbuh lebih cepat dibandingkan tingkat produktivitas perekonomian (M. Rasyidin, 2022).

Dalam sistem perekonomian modern, sasaran inflasi adalah tingkat inflasi yang diharapkan dapat dicapai oleh Bank Indonesia dengan berkonsultasi dengan pemerintah. Pemerintah menetapkan sasaran inflasi berdasarkan UUNo. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam nota kesepahaman antara pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi tiga tahun ke depan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Keuangan (PMK). Tingkat inflasi tahun kalender (Januari s/d Januari) 2021 sebesar 0,26% dan tingkat inflasi 1 tahun (Januari 2021 terhadap Januari 2020) sebesar 1,55% (BPS, 2021). Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) Desember 2022 sebesar 0,66% dan tingkat inflasi *your to date* (y-to-d) bulan Desember 2022 sebesar 5,52% (BPS, 2022). Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) sebesar 0,21% pada bulan Juli 2023 tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) pada bulan Juli 2023 sebesar 1,45% (BPS, 2023).

Keynes menekankan pengaruh signifikan kebijakan keuangan terhadap perekonomian. Sebelum Keynes, operasi keuangan pemerintah diasumsikan mempunyai dampak kecil terhadap tingkat lapangan kerja dan permintaan agregat. Peran pemerintah pada saat itu hanya sebatas mendistribusikan kembali sumber daya keuangan dari sektor swasta kepada pemerintah. Pandangan ini didukung oleh Say's Law, yang menyatakan bahwa dalam kondisi full employment, semua tambahan belanja pemerintah akan mengakibatkan pengurangan (crowding out) belanja swasta dengan jumlah yang sama dan pendapatan ini tidak mengubah total pendapatan.

Elastisitas perubahan harga dan inflasi disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus ditempuh secara tepat dan tegas serta berpedoman pada seperangkat prinsip yang harus diikuti secara sistematis. Misalnya, jika bank sentral ingin membatasi inflasi hingga 5% per tahun, maka bank sentral juga

harus mengendalikan jumlah uang beredar agar meningkat sebesar 5% per tahun. Meningkatnya inflasi dibarengi dengan melemahnya nilai tukar. Negara dengan nilai tukar yang kuat memberikan dampak positif terhadap perekonomian global, oleh karena itu pelaku pasar dan investor umumnya merespon tingkat suku bunga negara maju untuk mencapai keuntungan yang maksimal (M. Rasyidin, 2022).

Tingkat harga merupakan indikator yang sangat penting dalam sistem perekonomian modern karena membantu menjaga keseimbangan distribusi sumber daya ekonomi di suatu negara. Adanya tingkat inflasi yang tinggi dapat mengaburkan atau bahkan menghilangkan indikator-indikator tersebut dan menyebabkan dispersi harga-harga yang terjadi. Hal ini akan mempersulit perencanaan dan tidak akan memotivasi masyarakat dan perekonomian untuk menabung dan berinvestasi (Rahma Saiyed, 2021).

Pengendalian inflasi sangat penting dan menjadi salah satu perhatian karena beberapa alasan. Inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan yaitu, menjadikannya tidak berkelanjutan dan mengurangi tabungan dalam negeri, yang merupakan sumber investasi bagi negara-negara berkembang. Inflasi juga dapat menyebabkan defisit perdagangan dan peningkatan utang luar negeri (Raham Saiyed, 2021).

## **KAJIAN TEORITIS**

Kebijakan moneter merupakan suatu bentuk pengendalian dan pengarahan kegiatan makroekonomi ke arah keadaan atau kepada keadaan yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Ketika kondisi perekonomian lebih baik maka keseimbangan output akan meningkatkan dan stabilitas harga akan terkendali dengan baik. Kebijakan moneter memungkinkan pemerintah untuk mengatur dengan mempertahankan, menambah atau bahkan mengurangi jumlah uang yang beredar atas kontrol dan tidak lain untuk mempertahankan aktivitas ekonomi dalam lingkungan inflasi. Ada dua jenis aturan kebijakan moneter, yaitu manajemen permintaan dan target moneter. Pengendalian permintaan adalah pengendalian inflasi, yaitu menjaga dan mendukung permintaan uang, barang dan jasa untuk membatasi laju inflasi. Tujuan kebijakan moneter adalah mengendahkan jumlah uang yang beredar.

Ada tiga instrumen kebijakan moneter utama yaitu: Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation), Fasilitas Diskonto (Discount Rate), dan Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio). Selain tiga instrumen tersebut, pemerintah juga bisa melakukan imbauan moral (Luluk Masrufah, 2022).

Kebijakan fiskal merupakan suatu bentuk tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran dan pajak atau menggunakan instrumen fiskal untuk mempengaruhi jalannya sistem perekonomian sehingga kesejahteraan perekonomian dapat maksimal. Secara umum, kebijakan fiskal diartikan sebagai pengelolaan anggaran pemerintah dengan tujuan mempengaruhi perekonomian, misalnya melalui tindakan yang melibatkan pemerintah.

Kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam membentuk kegiatan perekonomian suatu negara, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan. Namun pengaruh kebijakan keuangan terhadap aktivitas perekonomian suatu negara sangat besar. Berbagai indikator perekonomian lainnya juga mengalami perubahan akibat penerapan kebijakan keuangan pemerintah. Dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi harus selalu

positif, sedangkan dampaknya terhadap inflasi harus selalu negatif. Namun secara teoritis, kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan meningkatkan belanja masyarakat tanpa menambah sumber pajak, yang merupakan sumber utama keuangan pemerintah, akan menyebabkan defisit anggaran (Luluk Masrufah, 2022).

Inflasi merupakan permasalahan makroekonomi yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah kebijakan moneter seperti suku bunga, nilai tukar, dan jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar secara konstan menyebabkan inflasi, jika jumlah uang beredar terus meningkat hal ini akan menyebabkan inflasi. Artinya inflasi disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang beredar. Dengan mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga akan naik, dan kenaikan suku bunga kemungkinan besar akan membawa inflasi kembali ke tingkat rendah, sehingga melemahkan perekonomian (Darman, 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data tertulis seperti buku, kitab, jurnal, terbitan berkala, surat kabar, dan lain-lain. Untuk memperoleh data yang sebaik-baiknya digunakan beberapa teknik, yang terpenting adalah penelitian yaitu pengumpulan bahan dengan membaca buku, majalah, dan bentuk bahan lainnya atau yang disebut penelitian kepustakaan. Teknik analisis data digunakan secara deduktif dan induktif untuk menemukan rumusan konseptual analisis kebijakan moneter dan fiskal dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan akhir yang memperkuat dan memperluas temuan relevan dari penelitian sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Ekonomi Moneter**

Kebijakan ekonomi moneter adalah tindakan bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar (mencegahnya menjadi berlebihan atau langka). Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. (STIE YKPN, 2023) Berbagai instrumen kebijakan moneter yang digunakan antara lain:

- a. Kenaikan/penurunan suku bunga  
Ketika ingin merangsang pertumbuhan ekonomi, bank menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Untuk pengendalian inflasi, bank akan menaikkan suku bunga, sehingga mengurangi pengeluaran dan membatasi pertumbuhan kredit.
- b. Menambah/menurunkan cadangan bank (misalnya penjualan/pembelian SBN)  
Bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas pasar dengan membeli atau menjual obligasi pemerintah atau mata uang asing. Dengan menambah atau mengurangi cadangan bank, mereka dapat mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian.
- c. Penetapan rasio cadangan wajib bank umum (GWM: Giro Wajib Minimum)

Bank sentral dapat menetapkan persyaratan cadangan minimum yang harus dipatuhi oleh bank umum. Dengan mengubah presentase cadangan yang harus disimpan, bank sentral dapat mempengaruhi berapa banyak uang yang tersedia bagi bank komersial untuk diberikan pinjaman.

Untuk mengatasi inflasi, salah satu langkah kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia adalah dengan menerapkan kebijakan acuan atau suku bunga baru, menggantikan BI rate dan BI 7-day (reverse) repo rate yang mulai berlaku pada 19 Agustus 2016. Penguatan kerangka regulasi operasi moneter merupakan praktik umum yang dilakukan seluruh bank sentral dan mewakili praktik terbaik internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter terus disempurnakan agar kebijakan lebih efektif dalam mencapai target inflasi yang telah ditetapkan.

BI 7-day Repo Rate berpotensi memberikan dampak cepat terhadap pasar uang, perbankan, dan sektor riil karena BI 7-day Repo Rate sebagai acuan baru memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan suku bunga uang. Mempunyai pasar, bersifat transaksional atau diperdagangkan di pasar. Dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo. Sesuai dengan prinsip implementasi reformulasi, perubahan ini tidak mengubah arah kebijakan moneter karena BI Rate dan BI 7-day Repo Rate keduanya memiliki struktur suku bunga yang sama (term structure) guna mengendalikan inflasi sesuai dengan kebijakan sarannya. Perbedaannya hanya terlihat pada susunan kata instrumennya, yaitu BI Rate sama dengan instrumen moneter 12 bulan, sedangkan BI-day Repo Rate sama dengan instrumen moneter 7 hari (BI, 2023).

Dengan menggunakan instrumen BI 7-day (reverse) Repo Rate, kebijakan rate terbaru diharapkan setidaknya mempunyai tiga dampak utama yaitu (BI, 2023):

- a. Memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan menggunakan BI 7-day Repo Rate menjadi acuan utama dipasar keuangan.
- b. Meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya terhadap perkembangan suku bunga perbankan.
- c. Menciptakan pasar keuangan yang lebih dalam, termasuk pasar transaksi, dan membuat model struktur suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk jangka waktu mulai dari 3 hingga 12 bulan.

Ketika harga BBM naik pada tahun 2005 dan 2008, kemampuan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi sangat terbatas sehingga mengakibatkan kenaikan inflasi yang tajam. Karena faktor kejutan juga mempengaruhi tingkat inflasi, maka pencapaian sasaran inflasi, maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dan BI di semua bidang kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral. Selain itu, karakteristik inflasi di Indonesia yang sangat sensitif terhadap guncangan sisi penawaran memerlukan tindakan khusus dalam hal ini.

Salah satu upaya yang dilakukan bank sentral atau otoritas moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk menyediakan likuiditas yang cukup bagi perekonomian sehingga transaksi bisnis dapat dilakukan tanpa tekanan inflasi. Ilmu ekonomi umumnya menggunakan beberapa indikator untuk mengevaluasi kebijakan moneter, yaitu jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan ekspektasi masyarakat. Suku bungan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap investasi di sektor industri sehingga mendorong produksi. Karena nilai tukar mempengaruhi harga yang mencakup produk dan alat

produksi. Jika langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar, pemerintah akan menerapkan kebijakan moneter ekspansif. Jika jumlah uang beredar menurun, idealnya pemerintah melanjutkan kebijakan moneter yang restriktif (Budiyanti, 2014).

Jika kita melihat kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah saat ini dari sudut pandang ekonomi Islam, maka belum ada instrumen kebijakan moneter yang pernah digunakan pada masa awal Islam karena belum ada sistem perbankan seperti yang kita miliki saat ini. Alat lain yang saat ini digunakan adalah pelaksanaan operasi pasar terbuka, termasuk pembelian dan penjualan surat berharga. Operasi pembukaan pasar ini juga belum pernah ada dalam sejarah perekonomian Islam pada tahun, pada awal perkembangannya. Pada saat yang sama, sistem konsumsi, tabungan, investasi, dan perdagangan yang ditetapkan pemerintah telah menciptakan instrumen otomatis dalam penerapan kebijakan moneter (Karim, 2017).

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Tujuan ini ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Ada dua dimensi yang memperhatikan kestabilan nilai rupiah, yaitu pertama, kestabilan nilai rupiah. Stabilitas harga dan jasa inilah yang tercermin dari perkembangan tingkat inflasi. Dimensi kedua terkait fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Sehubungan dengan perubahan nilai rupiah dibandingkan mata uang negara lain, Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang (*free floating*).

Peran stabilitas nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga fungsinya mekanisme pasar. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia telah menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF) sejak 1 Juli 2005. Kerangka kebijakan moneter dinilai telah sejalan dengan amanat aspek kelembagaan perundang-undangan. Dalam pendekatan ini, tujuan utama (*overriding objective*) adalah inflasi. Bank Indonesia terus menyempurnakan kerangka kebijakan moneter untuk meningkatkan efektifitasnya seiring dengan perubahan dinamika perekonomian dan tantangan yang muncul (BI, 2019).

Tujuan operasional kebijakan moneter tercermin dari perkembangan suku bunga di Pasar Uang Antara Bank Overnight (PUAB O/N). Perubahan suku bunga PUAB diharapkan akan berdampak pada perubahan suku bunga simpanan dan juga suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, Bank Indonesia pada umumnya menaikkan suku bunga referensi ketika inflasi di masa depan diperkirakan melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan Bank Indonesia menurunkan suku bunga referensi ketika inflasi di masa depan diperkirakan berada di bawah target yang telah ditentukan (Saridawati, 2015).

## **2. Kebijakan Ekonomi Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Ibarat seseorang yang tidak mau rugi di akhir bulan, bahkan negara juga tidak ingin mengalami kerugian. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas, atau keseimbangan, pendapatan dan pengeluaran dengan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah seperti ketimpangan pendapatan dan pengangguran. (STIE YKPN, 2023) Terdapat berbagai

pilihan kebijakan fiskal seperti keseimbangan, surplus, defisit dinamis, namun alat kebijakan fiskal yang umum digunakan antara lain:

- a. Menyusun pengeluaran publik atau belanja proyek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Pemerintah bisa menggunakan pengeluaran publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan belanja pada infrastruktur, pendidikan, atau proyek-proyek publik lainnya, pemerintah dapat menciptakan suatu lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

- b. Menyalurkan subsidi untuk industri tertentu

Pemerintah bisa memberikan subsidi kepada sektor-sektor tertentu seperti energi, pertanian, atau perumahan sebagai alat pendorong aktivitas ekonomi di sektor tersebut.

- c. Mengimplementasikan kebijakan pajak, tidak boleh lupa karena ini adalah salah satu sumber pendapatan negara.

Pemerintah bisa menggunakan kebijakan pajak untuk mengatur suatu pendapatan dan pengeluaran publik. Pemerintah juga bisa menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi, atau meningkatkan pajak untuk mengurangi defisit suatu anggaran atau mengendalikan inflasi.

- d. Menerapkan kebijakan utang

Kebijakan utang bisa digunakan pemerintah untuk mengatur suatu pembiayaan untuk publik, Mereka bisa mendapatkan pinjaman dari pasar keuangan atau meluncurkan obligasi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek atau membayar defisit anggaran.

Dalam konteks ekonomi makro, fundamental ekonomi penting lainnya adalah kebijakan fiskal pemerintah. Menurut (Saragih, 2016), kebijakan merupakan bagian dari kebijakan makro ekonomi yang mempunyai tujuan untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan di berbagai sektor dan memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- a. Alokasi anggaran negara berfungsi untuk menandai pembangunan di berbagai bidang
- b. Distribusi pendapatan dan subsidi berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Stabilitas ekonomi makro berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu, lewat upaya meredam siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi dengan bersifat kontra siklus (counter cyclical) bahwa dalam kondisi suatu perekonomian lesu, pengeluaran dari pemerintah yang bersifat autonomous, termasuk belanja suatu barang atau jasa serta belanja modal dapat memberi stimulus terhadap perekonomian untuk tumbuh tinggi.

Untuk mengatasi krisis ekonomi, intervensi kebijakan moneter dan anggaran oleh pemerintah sangatlah penting. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak hanya kantor pos atau melakukan intervensi bila diperlakukan, namun juga berkewajiban, berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya, untuk menjaga stabilitas antara penawaran dan permintaan, untuk mencegah persaingan komersial yang tidak sehat dan monopoli perdagangan, untuk melindungi perusahaan kecil dan penyediaan barang publik. Angka mengingatkan kita pada infrastruktur yang mampu menjaga roda perekonomian tetap

berputar. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai peranan penting dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Peran tersebut harus sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan mempercepat kinerja perekonomian guna mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta program pencegahan korupsi pemerintah yang efektif, efisien dan tepat (Ina Heliany, 2021).

Menurut Robert Naro, demokrasi dapat mendorong dan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, menurutnya demokrasi sebenarnya terkait dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, beliau berpendapat: *hubungan dibangun antara demokrasi dan pertumbuhan muncul dari hubungan antara demokrasi dan faktor-faktor penentu pertumbuhan lainnya seperti modal manusia dan modal sosial, dan hubungan kita dimedia oleh kualitas pemerintahan.* Oleh karena itu sistem demokrasi sendiri harus mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, mencegah praktik korupsi di kalangan pejabat dan aparatur birokrasi, serta meningkatkan kualitas agar pembangunan demokrasi yang baik dapat berlangsung. Pemerintah yang bebas korupsi dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik, namun hal ini hanya dapat terjadi jika terdapat kontrol sosial yang ketat terhadap pers yang mencerminkan kebebasan berekspresi di masyarakat. Oleh karena itu, peran kebijakan perpajakan dalam mempengaruhi perkembangan demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, yaitu: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Hal ini disebut pengaruh kondisional dari perkembangan demokrasi. Kondisi hubungan pembangunan demokrasi.

### **3. Pengendalian Inflasi**

Bank Indonesia dan pemerintah senantiasa berupaya mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan dengan cara mengkoordinasikan kebijakan-kebijakannya sesuai sasaran inflasi. Salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi pada tingkat rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar selaras dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sasaran inflasi telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, setelah berlakunya Undang-Undang ini, pemerintah menetapkan target inflasi untuk meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia. Kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan untuk merespon tekanan harga yang timbul dari permintaan agregat (manajemen permintaan) dan kondisi penawaran. Dalam hal ini, kebijakan moneter tidak dimaksudkan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang merupakan guncangan sementara yang akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.

Salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah bertambahnya jumlah uang beredar di masyarakat. Ketika pemerintah mencetak atau mengedarkan terlalu banyak uang, nilai uang tersebut menurun. Secara sederhana, inflasi didefinisikan sebagai tren kenaikan harga barang dan jasa yang umum dan terus-menerus. Pengertian inflasi mengandung dua kata kunci, yaitu pertama kenaikan harga secara umum dan kedua terus-menerus. Inflasi harus mencakup unsur kenaikan harga secara umum (Suseno, 2009). Inflasi pada hakikatnya adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang bersifat umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain; peningkatan konsumsi masyarakat,

kelebihan likuiditas di pasar yang menyebabkan konsumsi atau bahkan spekulasi sehingga terjadinya kejanggalan distribusi barang (Aisyah, 2009).

Kenaikan harga satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi kecuali kenaikan tersebut menyebar ke barang lain (menyebabkan harga lebih tinggi) indikator yang biasa digunakan untuk mengukur inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK mencerminkan perubahan harga seluruh barang dan jasa dalam keranjang IHK didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) serta dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS kemudian akan memantau secara bulanan perkembangan harga barang dan jasa tersebut di berbagai kota dipasar tradisional dan modern untuk berbagai jenis barang dan jasa di setiap kota.

Ketika kita berbicara tentang inflasi, kita tentu harus memperhatikan bentuk inflasi itu sendiri, dengan inflasi nol persen merupakan harapan dan tujuan pemerintah untuk mengatasi sistem perekonomian negara, pemerintah harus memastikan tingkat inflasi tidak melebihi 5%. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi adalah dengan menerapkan langkah-langkah kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dengan membatasi belanja masyarakat dilakukan oleh kementerian keuangan, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia.

Ketika terjadinya ketidakpastian dan keterlambatan perekonomian global, Tercatat tetap kuat dan stabil perekonomian Indonesia. Data Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 terus tumbuh dengan nilai 4,94% (yoy), walaupun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai nilai 5,17% (yoy). Pertumbuhan ekonomi didukung oleh sektor keuangan tahun 2023 yang dinilai stabil dan resilien tercermin dari melihat pertumbuhan sektor pasar modal, perbankan dan industri keuangan non bank. Pada sektor pasar modal, IHSG posisi 30 November 2023 tercatat menguat sebesar 3,36% secara *ytd* ke level Rp7.080,74. Untuk sektor perbankan, kinerja intermediasi perbankan posisi Oktober 2023 tetap terjaga dengan nominal pada penyalur kredit sebesar Rp6.902,98 triliun (tumbuh 8,99% secara *yoy*) dan penghimpun dana pihak ketiga (DPK) mencapai sebesar Rp8.198,80 triliun (tumbuh 3,43% secara *yoy*). Adapun untuk sektor keuangan non bank, akumulasi pendapatan premi perusahaan asuransi posisi Oktober 2023 mencapai sebesar Rp264,23 triliun (tumbuh 3,54% secara *yoy*) dan dari industri perusahaan pembiayaan, piutang pembiayaan mencapai Rp463,12 triliun (tumbuh sebesar 15,02% secara *yoy*). Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia tetap terus tumbuh dan kuat di tengah terjadinya perlambatan perekonomian serta tingginya ketidakpastian global (OJK, 2024).

Sifat keuangan syariah menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara sektor moneter dan sektor riil. Sebagaimana teori endogenous, Islam perkembangan sektor moneter hanya merupakan cerminan dari perubahan sektor riil. Kebijakan moneter dan fiskal ekonomi Islam selalu ditujukan pada lokasi sumber daya untuk mencapai produktivitas penuh. Paradigma ini juga berlaku pada pengelolaan permintaan uang (Karim, 2017).

Apabila pembiayaan dari bank syariah disalurkan ke sektor riil, maka akan berdampak pada jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat. Kebutuhan dalam negeri akan lebih mudah terpenuhi ketika produktivitas individu meningkat dan kemampuan mengeksplor barang ke luar negeri juga meningkat. Peningkatan produksi eksplorasi akan meningkatkan aliran pendapatan negara dari penerimaan devisa yang dihasilkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang modal negara.

Sebagaimana dikemukakan Ibnu Khaldun, ketika suatu negara melakukan kegiatan eksplorasi, permintaan barang dan jasa dalam negeri terpenuhi.

Ketika tingkat produksi suatu jenis barang tertentu di suatu negara lebih tinggi dari tingkat permintaan domestik di negara tersebut, atau pasokan melebihi permintaan, hal ini memungkinkan negara tersebut untuk melakukan eksplorasi. Pada saat yang sama, Adam Smith mencatat bahwa barang yang akan dieksplorasi haruslah barang yang memiliki keunggulan absolut yang merupakan karakteristik suatu negara tertentu dan hal ini dapat dicapai melalui spesialisasi. Adanya keseimbangan antara sektor riil dan moneter akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Peningkatan pembiayaan perbankan pada sektor riil melalui bank syariah dan peningkatan kegiatan eksplorasi akan mempengaruhi keseimbangan perekonomian yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Ansuri, 2013).

Menurut (Rusydia, 2009), kebijakan moneter yang restriktif dapat menyebabkan peralihan dari pinjaman beresiko ke obligasi yang aman, sehingga mengurangi permintaan agregat karena investor atau peminjam mengurangi investasinya. Hal ini terlihat dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah di Indonesia, dimana dua sistem perbankan beroperasi secara berdampingan di Indonesia, yaitu bank konvensional dengan sistem suku bunga (interest rate system) dan bank syariah dengan sistem (free valuation).

Karena sistem syariah mempunyai instrumen SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Indonesia mempunyai mekanisme moneter ganda, yaitu mekanisme suku bunga dan mekanisme bagi hasil. Sistem bagi hasil sebagai prinsip perhitungannya, yang didasarkan pada pendapatan produsen atau peminjam, bersifat fleksibel terdapat imbalan bagi hasil. Dalam sistem ini, pertumbuhan jumlah uang beredar mengikuti pertumbuhan produksi. Adanya sistem bagi hasil memberikan peluang bagi konsumen untuk mengalihkan peminjaman dari sistem bunga ke sistem bagi hasil. Mekanisme substitusi ini menimbulkan kesenjangan dalam kebijakan moneter. Kemungkinan lainnya adalah dapat mengurangi dampak negatif dari kendala kredit pada sektor konvensional. Penurunan ini disebabkan oleh mekanisme kredit syariah yang menyeimbangkan pertumbuhan sektor moneter dan sektor riil, sehingga peningkatan porsi pembiayaan syariah dalam perekonomian dapat menurunkan laju inflasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Ketergantungan kebijakan moneter dan fiskal terhadap pengendalian inflasi di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat inflasi. Penerapan kebijakan moneter, seperti penertapan suku bunga dan pengelolaan likuiditas, berperan penting dalam mengendalikan inflasi dengan mengatur jumlah uang yang beredar di pasar. Sementara itu, langkah-langkah kebijakan fiskal seperti pengaturan anggaran dan pajak juga mempengaruhi inflasi dengan mempengaruhi permintaan agregat dan stabilitas harga. Oleh karena itu, penting untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi. Koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan pemerintah diperlukan untuk menghindari konflik politik yang dapat memperburuk volatilitas harga. Selain itu, peran penting pemerintah dan negara adalah melakukan analisis keberlanjutan terhadap dinamika perekonomian dan faktor eksternal seperti,

perubahan kondisi pasar global dan keseimbangan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi riil menentukan porsi pembiayaan syariah dalam perekonomian dapat menurunkan tingkat inflasi.

## DAFTAR REFERENSI

- Masrufah, L. (2022). Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Perekonomian: Pengertian, jenis, instrumen, contoh dari kebijakan moneter dan fiskal. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 38-55. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/view/37>
- Rasyidin, M., Saleh, M., Muttaqim, H., Nova, N., & Khairani, C. (2022). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 225-231. <http://ejournal.seminar-id.com/index.php/jbe/article/view/1761>
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/infographic?id=563> (Di akses 11 Maret 2024)
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/infographic?id=827> (Diakses 11 Maret 2024)
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/infographic?id=885> (Diakse 11 Maret 2024)
- Saiyed, R. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 5(1), 42-49. <http://ojs.stiem-bongaya.ac.id/JIB/article/view/278>
- Darman, D. (2016). Analysis of the Money Supply and Interest Rate of Inflation in Indonesia. *The Winners*, 17(1), 9-18. <https://journal.binus.ac.id/index.php/winners/article/view/1804>
- STIE YKPN, <https://www.stieykpn.ac.id/read/444/kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal.html>. (Di akses 09 Maret 2024)
- Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/bi-rate/default.aspx>. (Di akses 10 Maret 2024)
- Budiyanti, E. (2014). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 145-159. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/79>
- Karim, A. A. (2017). Ekonomi Makro Islam Cet Ke-9. Depok: Rajawali Pers.
- Saridawati, S. (2015). Analisis Peran Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI) Rate Terhadap Nilai Tukar US \$ dan Inflasi. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2). <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/968>
- Saragih, J. P. (2016). Bauran Kebijakan Moneter-Fiskal Terhadap Pencapaian Target Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. *Kajian*, 20(2), 163-182. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/576>

Helianny, I. (2021, March). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. In *Prosiding Seminar Stiarni* (Vol. 8, No. 1, pp. 15-21). <http://ojs.stiarni.ac.id/index.php/PS/article/view/1362>

Aisyah, S., & Suseno, S. (2009). Inflasi.

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/3983/outlook-ekonomi-dan-keuangan-di-tahun-2024>. (Di akses 10 Maret 2024)

Asnuri, W. (2013). Pengaruh instrumen moneter syariah dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(2). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2569>

Rusydiana, A. S. (2009). Mekanisme transmisi syariah pada sistem moneter ganda di Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 11(4), 345-367. <https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol11/iss4/3/>